BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Bidang-bidang yang mencakup hubungan internasional meliputi keseluruhan interaksi politik, ekonomi, budaya dan interaksi lainnya antara aktor negara maupun non negara (Viotti & Kauppi, 1999: 483). Untuk dapat memahami aktifitas dan fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional, maka dikembangkan studi Hubungan Internasional yang memiliki tujuan dasar mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor-aktor internasional baik aktor negara maupun non negara dalam interaksi internasional yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu wadah organisasi internasional (Mas'oed, 1989: 31-32).

Studi ini merupakan bagian dari ilmu yang lebih luas yaitu ilmu politik, dan menitikberatkan kepada pentingnya studi fenomena-fenomena politik pada

peringkat global, serta kepada masalah-masalah pemeliharaan perdamaian, studi srategis dan pembangunan internasional (Couloumbis dan Wolfe,1999: 21).

Dengan adanya studi yang mempelajari hubungan internasional yang tidak hanya dalam permasalahan politik saja. Studi hubungan internasional dipandang sebagai cabang dari ilmu politik yang mengkaji hubungan antara unit-unit politik nasional dan berkaitan langsung dengan kebijakan luar negeri, organisasi dan fungsi dari badan-badan pemerintah yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri serta factor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri tersebut (seperti geografi dan ekonomi) (Pearson & Rochester, 1992:16).

Studi Hubungan Internasional menurut McClelland dalam Perwita & Yani merupakan suatu studi tentang interaksi antar jenis-jenis kekuatan sosial tertentu dimana di dalamnya terdapat studi tentang keadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi tersebut. Interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor hubungan internasional dilandasi oleh adanya sumber daya yang melekat pada tiap-tiap aktor tersebut (2005: 4).

Hubungan internasional berkembang bersamaan dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang diciptakan menyebabkan studi hubungan internasional menjadi semakin kompleks. Kompleksitas hubungan internasional itu sesuai dengan pendapat Jack C. Plano yang mengatakan bahwa hubungan internasional mencakup hubungan antar negara atau sebagai interaksi para aktor yang tindakan serta kondisinya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap aktor lainnya untuk memberikan tanggapan (1999: 115).

Dengan adanya berbagai interaksi dalam dunia internasional membuat negara harus saling berlomba dan berpartisipasi dalam dunia internasional. Hubungan internasional merupakan studi mengenai interaksi berbagai aktor yang berpartisipasi di dalam poltik internasional termasuk negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, entinitas subnasional seperti birokrasi, pemerintah lokal dan individu. Hubungan internasional merupakan studi tentang tingkah laku dari aktor-aktor tersebut ketika berpartisipasi baik sendiri-sendiri dan bersama-sama dalam proses politik internasional (Mingst, 1999:2).

Hubungan internasional sebagai sebuah cabang ilmu politik dan sosial membuatnya menjadi sebuah kajian yang dinamis, tidak akan pernah berhenti pada satu titik yang bersiftat statis. Studi ini akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan muncul fenomena-fenomena baru dan pemikir-pemikir baru dalam upaya pemecahan berbagai masalah.

2.2 Politik Internasional

Politik internasional merupakan salah satu kajian pokok (*core subject*) dalam Hubungan Internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*). Menurut Holsti, dalam Perwita & Yani, studi politik internasional adalah studi mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain (2005: 40).

Politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional yang membahas keadaan atau soal-soal politik di

masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu dengan berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya Adapun objek yang menjadi kajian politik internasional juga merupakan kajian politik luar negeri, dimana keduanya menitikberatkan pada penjelasan mengenai kepentingan, tindakan serta unsur *power*. Dalam politik internasional pelakunya hanyalah negara, inilah yang membedakan antara politik internasional dengan hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005: 40).

Politik internasional adalah disiplin akademisi yang berbeda dari sejarah yang belum lama dan kejadian-kejadian terbaru. Politik internasional sebagaimana halnya poltik pada umumnya adalah perebutan kekuasaan. Politik internasional sendiri tidak dapat diubah menjadi ketentuan-ketentuan tersebut melalui perantara lembaga-lembaga tersebut (Morgenthau, 1990:25-26).

Dengan adanya perebutan kekuasan, maka para aktor yang terlibat dalam upaya-upaya untuk mendapatkan kekuasaan tersebut merupakan aktor dalam kancah politik internasional. Aktor yang dimaksud ialah negara. Dalam dunia poltik internasional tidak semua tindakan yang diambil oleh aktor-aktor selalu bersinambungan atau berhubungan dengan politik. Keterlibatan aktor-aktor dalam hal ini negara sebagai dalam politik internasional hanya satu dalam sekian banyak jenis kegiatan dimana negara tersebut dapat ikut serta dalam kancah internasional. Tidak semua negara terlibat dalam taraf yang sama, sehingga hubungan negara dengan poltik internasional bersifat dinamis (Morgenthau, 1990:41-42).

Terdapat suatu penggambaran tiga arena politik internasional, yaitu: *global, region*, dan *nation-state* yang memberikan dasar struktrur analitis untuk

pertimbangan politik internasional. Di dalam politik internasional, sebuah sistem merupakan keseluruhan hubungan yang berlangsung diantara unit-unit yang mempunyai kuasa di dalam arena khusus, ada tiga arena yang mewakili tiga sistem tersebut, yaitu:

1. Sistem dominan (*the dominant system*) yang berada di arena global, merupakan konfrontasi yang paling kuat dari negara-negara.
2. Sistem subordinat (*the subordinate system*) yang berada di suatu *region*, merupakan keseluruhan interaksi hubungan-hubungan diantara *region* tersebut.
3. Sistem internal (*the internal system*) yang berada di suatu negara (bangsa), merupakan keseluruhan hubungan-hubungan organisasi yang tersusun di dalam suatu politik domestik (Cantori & Spiegel, 1970: 2-3).

2.3 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (Perwita & Yani, 2005: 47). Sedangkan politik luar negeri menurut Suffri Yusuf, S.H dalam buku *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri* merupakan iringan kebijaksanaan disertai rentetan tindakan yang rumit tetapi dinamis, yang ditempuh oleh negara itu dalam hubungannya dengan negara-negara lain atau sebagai kegiatannya dalam organisasi-organisasi regional dan internasional (1989: 113).

Politik luar negeri terdiri dari dua elemen, yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan alat-alat untuk mencapainya. Interaksi antara tujuan nasional dengan sumber-sumber untuk mencapainya merupakan subjek kenegaraan yang abadi (Crabb Jr. dalam Couloumbis & Wolfe, 1999: 126). Adapun keputusan-keputusan dalam politik luar negeri terdiri dari tiga kategori utama, yaitu:

1. Keputusan yang bersifat pragmatis (terencana) adalah keputusan besar yang mempunyai konsekuensi jangka panjang; membuat studi lanjutan, pertimbangan dan evaluasi yang mendalam mengenai seluruh opsi alternatif.
2. Keputusan yang bersifat krisis adalah keputusan yang dibuat selama masa-masa terancam berat; waktu untuk menanggapinya terbatas; dan ada elemen yang mengejutkan yang membutuhkan respon yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Keputusan yang bersifat taktis adalah keputusan penting biasanya bersifat pragmatis; memerlukan revaluasi, revisi dan pembalikan (Couloumbis & Wolfe, 1999: 129).

Keputusan-keputusan dalam politik luar negeri dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu penilaian masalah, perhitungan biaya atau risiko, aspek domestik: konsensus, informasi kurang lengkap, tekanan waktu, gaya nasional, komitmen dan hal yang mendahului.

1. Penilaian masalah

   Suatu unsur yang amat penting dalam analisis masalah adalah pemilihan awal sasaran yang ingin dicapai. Ini merupakan inti dari strategi yang berupa suatu rencana penggunaan sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan yang

ditetapkan sebelumnya. Dalam tingkat politik luar negeri, rencana semacam itu disebut strategi nasional.

2. Perhitungan biaya atau risiko

   Perhitungan biaya atau risiko merupakan faktor yang mempengaruhi suatu keputusan politik luar negeri, karena tidak ada negara yang dapat melakukan politik luar negeri bisa terbebas dari hal ini yaitu pembatasan jumlah sasaran, dan terbatasnya jumlah pilihan alternatif yang tersedia.

3. Aspek domestik: konsensus

   Semua negara tanpa memandang bentuk pemerintahan dan falsafah politiknya terikat oleh konsensus rakyat dan dibatasi oleh sikap masyarakat.

4. Informasi kurang lengkap

   Dalam politik luar negeri, informasi yang kurang lengkap antara lain disebabkan oleh kelambanan pembuat keputusan dalam mengejar peristiwa yang cepat berubah sebelum fakta-fakta yang ada lengkap terkumpul. Karena itu informasi seadanya akan dijadikan dasar untuk mengurangi resiko seminimal mungkin. Informasi tidak lengkap mempunyai dua arti yaitu kekurangan data atau terlalu banyak data. Kurangnya data disebabkan lambatnya informasi dan bila tidak dapat menunggu, maka pembuat keputusan akan mengisinya dengan *estimate* atau perkiraan. Bilamana terlalu banyak data, maka informasi yang diperlukan terkubur dalam tumpukan data dan memerlukan waktu unuk menemukannya sedangkan waktu mendesak untuk mengambil keputusan.

5. Tekanan waktu

   Berbagai peristiwa terjadi dengan cepat dan hasil-hasilnya jauh lebih cepat diketahui, sehingga banyak para pembuat keputusan politik luar negeri menghadapi masalah waktu yang diperlukan untuk dapat berpikir tepat dan akan kehilangan mutu pemahaman dan keluwesan yang diperlukan dalam mengambil keputusan.

6. Gaya nasional

   Gaya nasional merupakan tradisi dan citra masyarakat yang mengharap para pejabatnya melaksanakan dan mengambil keputusan secara khusus sesuai dengan kehendaknya. Gaya nasional adalah hal yang penting dalam proses pembentukan pola analisis dari pembuat keputusan itu sendiri.

7. Komitmen dan hal yang mendahului

   Faktor terakhir yang mempengaruhi keputusan adalah struktur dari komitmen dan peristiwa yang mendahului sebelum keputusan dibuat. Dengan cara yang berbeda, semua negara atau aparatur pembuat keputusan dan individu-individu pembuat keputusan pasti terikat oleh masa lampaunya yang lama ataupun yang baru berlalu (Nasution, 1991: 21-24).

Di dalam politik luar negeri terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi pembuatan politik luar negeri. Rosenau mengelompokkan variabel-variabel yang ada dalam politik luar negeri ke dalam lima kategori, yaitu:

1. Variabel *Ideosyncretic* (variabel individual)

   Variabel ini berkaitan dengan persepsi, *image* dan karakteristik pribadi *decision maker*, antara lain: ketenangan *versus* tergesagesaan, kemarahan

versus prudensi, pragmatism *versus* ideologi yang bersifat pembasmian atau pemberantasan (*crusadism*), keunggulan *versus* keterbelakangan, kreativitas *versus* penghancuran, ketakutan *versus* sikap percaya diri yang berlebihan, dan lain-lain.

2. Variabel Peranan

   Variabel peranan ini biasanya didefinisikan sebagai gambaran pekerjaan atau sebagai aturan-aturan perilaku yang diharapkan bagi presiden, menteri-menteri kabinet, birokrat (pejabat) tingkat tinggi, wakil-wakil di kongres dan para senator, wartawan para pendidik, persatuan para buruh, dan para pemimpin kelompok penekan lainnya serta elit-elit lain yang mempengaruhi, merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan.

3. Variabel Birokratis

   Variabel ini menyangkut struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Variabel-variabel birokratis ini meliputi struktur organisasi pemerintah, standar prosedur pelaksanaan perwakilan-perwakilan birokratis yang besar, proses pembuatan keputusan pada berbagai peringkat perumusan kebijaksanaan, berbagai teknik implementasi keputusan-keputusan politik, dan sikap para pejabat menyangkut dampak politik luar negeri terhadap politik domestik dan kesejahteraan umum negara.

4. Variabel Nasional

   Yang termasuk ke dalam variabel-variabel nasional ini meliputi variabel lingkungan (*environmental variables*) seperti luas, lokasi geografis, tipe daerah, iklim dan sumber-sumber alam negara. Selain itu, GNP, hasil

pertanian dan industri, tingkat pertumbuhan ekonomi, kekuatan militer dan atribut-atribut lain dari kapabilitas *power* suatu negara juga termasuk ke dalam kategori variabel nasional.

5. Variabel Sistemik

   Variabel sistemik meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan negara lain yang bisa merangsang respons politik suatu negara (1980: 95-150).

Rossenau dalam bukunya *The Scientific Study of Foreign Policy* dijelaskan bahwa dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi suatu output. Proses konversi yang terjadi mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya (1980: 171-173). Selain itu juga politik luar negeri merupakan sintesa dari tujuan-tujuan nasional dan alat-alat negara (Couloumbis & Wolfe, 1999: 26).

Sedangkan, Charles Kegley dan Eugene Wittkopf dalam bukunya *American Foreign Policy: Pattern and Process* menyebutkan bahwa kerangka kerja dari politik luar negeri Amerika Serikat sesuai dengan analisis *Funnel of Casuality* dimana terdapat lima input dalam mencapai sebuah output kebijakan internasional, yaitu:

1. *External Sources,* mengacu pada lingkungan global Amerika Serikat, termasuk semua variable yang berhubungan dengan komunitas internasional.

Perubahan ini akan merangsang perubahan politik Amerika Serikat pada lingkungan eksternal.

2. *Societal Sources,* yaitu aspek-aspek non pemerintahan.
3. *Governmental Sources,* yaitu dinamika dan birokrasi serta sifat institusi yang mendominasi yang juga merupakan bagian dari mesin pembuat politik luar negeri seperti *white house, Central Intellegence Agency, congress* serta *department of state.*
4. *Roles Source*, setiap negara dalam birokrasi pembuatan keputusan membawa misi, kewajiban, hak, harapan masing-masing dan tekanan terhadap individu pengambil keputusan untuk bertindak seperti yang diharapkan dan dilakukan pendahulunya.
5. *Individual Sources,* keahlian, karakter, gaya, kepemimpinan, dan kepribadian yang dimiliki individu.

Input dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat merupakan sumber-sumber suatu kebijakan yang membentuk dan memberi arah kepada tindakan Amerika Serikat di luar negeri dimana tindakan tersebut merupakan proses pembuatan politik luar negeri.

2.4 *National Power*

Negara merupakan sebuah lembaga tertinggi dan memiliki kedaulatan. Untuk itu suatu negara tidak akan bisa lepas dari semua kemampuan dalam mempertahankan integritas serta mencapai semua kepentingan nasional. Salah

satu aspek yang akan mendukung dalam upaya mencapai kepentingan nasional adalah *national power*.

National power atau kekuatan nasional adalah tolak ukur kemampuan negara untuk mencapai tujuan dan melindungi kepentingan nasionalnya (Bolan, Robert I. http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1992/BRI.htm, diakses 28 April 2009). Menurut Ashley Tellis dan tim peneliti dari pusat penelitian RAND dalam buku yang berjudul *Measuring National Power* menyebutkan bahwa asumsi dasar dari konsep kekuatan nasional adalah memahami bahwa kekuatan nasional tidak hanya berasal dari aset-aset militer saja, tetapi juga keterbukaan terhadap inovasi, lingkungan sosial, dan ilmu pengetahuan. Bagi Tellis faktor-faktor tersebut mempengaruhi kapasitas suatu negara untuk menghasilkan elemen paling penting dalam politik internasional yaitu kekuatan militer efektif. (Treverton & Jones, 2005: 3).

Ada tiga elemen penting dalam kekuatan nasional yaitu geografi, power dan strategi. Sebuah negara mencari cara bagaimana mencapai tujuan dari kebijakan luar negeri melalui ketiga elemen power tersebut. Hal-hal tersebut akan berkaitan dengan penggunaan strategi politik melalui diplomasi dan negosiasi. Strategi ini berkaitan erat dengan strategi ekonomi suatu negara, dan keduanya digunakan dalam pembentukan aliansi dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Penggunaan strategi militer adalah upaya terakhir saat upaya diplomatik dan ekonomi telah gagal untuk melindungi kepentingan nasional. (Bolan, Robert I , http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1992/BRI.htm, diakses 28 April 2009)

Kekuatan nasional berkaitan erat dengan ketiga bidang, yaitu sumber daya alam, kinerja nasional dan kemampuan militer. Bidang pertama yaitu sumber daya alam mengukur tingkatan sumber daya alam yang tersedia atau diproduksi oleh sebuah negara, kedua kinerja nasional yaitu yang ebrhubungan dengan kinerja pemerintah dan sosial pada umumnya. Bidang ketiga yaitu kemampuan militer, dalam mengoperasionalkan dan efektifitasnya. Kemampuan militer merupakan sebuah hasil dari ketersediaan sumber daya yang diperuntukkan untuk organisasi militer dan kemampuan untuk mengkonversikan sumber daya tersebut untuk menjadi kekuatan yang efektif. (Treverton & Jones, 2005 : 4).

Columbis dan Wolfe membagi elemen kekuatan nasional kedalam dua bagian yaitu kekuatan yang *tangible* (nyata) dan kekuatan yang *intangible* (tidak nyata). Elemen kekuatan nasional yang nyata diataranya adalah populasi penduduk, wilayah, sumber daya alam dan kapasitas industri, kapasitas pertanian serta kekuatan militer dan mobilitas, sedangkan elemen kekuatau yang tidak nyata diantaranya kepemimpinan dan kepribadian, efisiensi organisasi-birokrasi, tipe pemerintahan, persatuan masyarakat, reputasi, dukungan luar negeri dan ketergantungan serta kecelakaan atau musibah. (1986 : 96-104)

Untuk mengukur kekuatan nasional, Major Bollan dalam thesisnya mengungkapkan bawa power bisa diukur dari tiga tingkatan yaitu: (1) sumber daya atau kapabilitas, terhadap pengendalian *power*, (2) bagaimana power tersebut dikonversikan melalui proses-proses nasional, (3) penggunaan power di negara dalam keadaan tertentu. (http://www.globalsecurity.org/military/library/report/ 1992/BRI .htm, diakses 28 April 2008)

Power tidak muncul sebagai sebuah kekuatan yang tidak terkalahkan, ada beberapa ancaman yang muncul karena kapabilitas dan kepemilikan sebuah negara terhadap power termasuk negara adidaya seperti AS. Tellis dalam buku yang sama juga mengungkapkan tentang ancaman bagi AS yang akan muncul dimasa mendatang, secara singkat Tellis menyebutkan 10 poin-poin yang akan mempengaruhi dan mengancam keamanan nasional AS, yaitu:

1. Perubahan ekonomi
2. Perubahan iklim
3. Ancaman militer, termasuk terorisme
4. Kriminal transnasional
5. Perubahan demografi
6. Tantangan teknologi dan pendidikan
7. Penyeberan senjata pemusnah missal
8. Perubahan ideologi
9. Ancaman kesehatan baru, seperti SARS
10. Munculnya aktor-aktor baru. (Treverton & Jones, 2005 : 6)

Untuk itu kekuatan militer dapat dipastikan menjadi elemen paling utama dalam upaya melindungi kepentingan nasional dan pembentukan strategi untuk mencapai kepentingan nasional tersebut. Kekuatan militer tetap menjadi garis terdepan dalam melindungi semua kepentingan nasional AS, seperti yang tercermin dalam peringkat kepentingan nasinoal, dimana AS menempatkan *defence for the homeland security* di ururan teratas.

2.4.1 Kekuatan Militer Sebagai *National Power*

Kekuatan militer (*force*) dan ancaman kekerasan telah menjadi bagian dari hubungan internasinoal dan perkembangan teknologi militer sering memberi pengaruh penting terhadap tatanan dan proses sistem politik (Holsti, 1987 : 389). Sebagian besar rakyat dunia percaya bahwa militer telah menjadi salah satu elemen dalam power.

Elemen power ini sangat erat kaitannya dengan gagasan tradisional yang mengatakan bahwa power didukung atau dibantu oleh kekuatan militer. Baik kekuatan militer maupun mobilitasnya bisa dianggap sebagai elemen yang nyata, karena kekuatan dan mobilitas tersebut bisa diukur menurut anggaran yang dikeluarkan untuk tujuan-tujuan pertahanan dan keamanan. Mobilitas merupakan konsep yang agak sukar dipahami. Pada dasarnya konsep tersebut berarti kemampuan suatu negara untuk mengeluarkan kekuatan angkatan bersenjatanya ke dan/atau di luar wilayahnya (Columbis & Wolfe, 1987: 99-100).

Militer telah menjadi elemen penting sejak masa awal revolusi industri, seiring dengan berkembangnya teknologi, kekuatan militer berkembang dalam sebuah fase yang disebut dengan *arm race* pada masa perang dingin, namun dengan berakhirnya perang dingin maka kekuatan militer pernah tidak terlalu menjadi pertimbangan besar pada masa yang disebut AS sebagai masa *peacetime military engagement*, yaitu masa pada paska perang dingin usai, dimana hal ini meliputi semua kegiatan militer dalam masa damai yang bertujuan untuk membentuk perdamaian internasional. (Szayna, 2004 : 9 diakses melalui www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub303.pdf, diakses pada tanggal

27 April 2009). Kegiatan militer hanya menyentuh aspek-aspek kehidupan sosial, tidak dalam koridor unjuk kekuatan. Kekuatan militer menjadi pertimbangan utama dalam mengamankan wilayah serta menjadi *bargaining position* suatu negara setelah serangan teroris ke gedung WTC pada 11 September 2001 lalu, dimana setelah serangan ini dunia kembali dibawa kedalam suasana persaingan senjata dan kekuatan militer.

AS yang berada dibawah pemerintahan putra dari mantan Presiden AS George Bush, memodifikasi politik luar negeri ayahnya tersebut, Bush senior yang menganut pendekatan realisme melalui *balance of power* dimodifikasi oleh George W Bush menjadi politik keseimbangan (realis) yang lebih keras dan bersifat unilateral (Daulay, 2009 : 69).

Untuk itu militer menjadi salah satu aspek penting bagi kepentingan nasional suatu negara, khususnya AS yang menjadi satu-satunya negara adidaya paska runtuhnya Uni Soviet.

2.5 Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Pengertian kepentingan nasinoal menurut T May Rudi yaitu:

> "Kepentingan nasional (*national interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), pasti terdapat serta merupakan dasar

> dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (2002 : 116).

Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai sebuah upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara control suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survive*) dalam percaturan politik internasional.

Eksistensi suatu negara akan tetap berlangsung sekiranya tercapai kepentingan-kepentingan negara. Kepentingan-kepentingan ini jelas tidak dapat dipenuhi hanya dalam satu lingkup domestik saja, namun juga harus melalui kerangka hubungan antar negara. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi negara. Konsep tersebut mencakup melestaikan kesatuan teritorialnya, menjaga independensi politik dan ekonomi, mencapai standar hidup yang lebih tinggi bagi populasinya (London, 1964 : 1).

Menurut Morgenthau kepentingan nasioal adalah perbendaan antar kepentingan-kepentingan politik yang saling bertentangan, kepentingan nasional bukan cita-cita yang bisa dicapai secara abstrak maupun ilmiah, tapi merupakan produk persaingan politik internal yang konstan. Pemerintah, melalui badan-badan perwakilannya, akhirnya bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan politik yang berorientasi kepadan kepentingan nasional (Thucydides, 1960 : 114).

Kepentingan nasional dapat juga dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Plano dan Olton, 1999 : 17).

Konsep kepentingan nasional dapat digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, mengevaluasi sumber-sumber kebijakan luar negeri suatu negara, sebagai instrumen tindakan politik, kepentingan nasional digunakan sebagai cara untuk menjustifikasi, melaporkan dan mengusulkan kebijakan.

Adapun ide kepentingan nasional mengacu pada perangkat yang ideal dari tujuan-tujuan nasional dari suatu bangsa yang harus ditemukan sebagai dasar dari pelaksanaan hubungan luar negeri negara tersebut (Seabury, 1963 : 86).

Sehingga, konsep kepentingan nasional ini dapat digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau mengevaluasi sumber-sumber kebijakan luar negeri suatu negara (dasar pokok orientasi kebijakan luar negeri), serta merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan atau langkah yang akan dioperasionalkan dalam menghadapi berbagai situasi dalam forum internasional. Sedangkan sebagai instrumen tindakan politik sendiri, kepentingan nasional digunakan sebagai cara menjustifikasi, melaporkan dan mengusulkan kebijakan-kebijakan.

Kepentingan nasional merupakan dasar pokok orientasi kebijakan luar negeri dan merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan atau langkah

yang akan dioperasionalkan dalam menghadapi berbagai situasi dalam forum nasional.

Pemerintah menentukan urutan prioritas kepentingan yang hendak dipertahankan dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun cara pendekatan dan pelaksanaannya dirumuskan dalam suatu kebijakan luar negeri dan disusun melalui strategi. Karena keadaan internasional yang selalu dinamis yang selalu memiliki perubahan-perubahan yang terus menerus dari waktu ke waktu maka kebijakan luar negeri selalu memerlukan penyesuaian dengan perkembangan-perkembangan tersebut, bahkan harus dapat mengantisipasi sejauh mungkin perkembangan selanjutnya.

2.6 Strategi

Strategi adalah seluruh keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang akan dan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan. Merumuskan suatu strategi berarti menperhitungkan semua situasi yang mungkin dihadapi pada setiap waktu di masa depan dan kemudian dari semenjak sekarang sudah menetapkan atau menyiapkan tindakan mana yang akan diambil atau dipilih kelak, guna menghadapi realisasi dari setiap kemungkinan tersebut. Strategi pertahanan dirumuskan untuk menghadapi gangguan-gangguan terhadap kemerdekaan nasional yang sebab inisialnya dating dari luar wilayah nasional. Strategi keamanan dirumuskan untuk menanggulangi gangguan-gangguan terhadap keamanan nasional yang timbul dari dalam negeri sendiri, diarahkan oleh elemen-elemen dari wilayah nasional guna

kepentingan atau keuntungan-keuntungan elemen-elemen tersebut." (May Rudi, 2001:1)

May Rudi dalam bukunya Studi Strategis menyebutkan bahwa pola strategi terbagi menjadi dua yaitu *sequental* dan kumulatif (2001 : 10). Pola strategi *sequental* menyebutkan bahwa satu langkah dengan langkah berikutnya tidak dapat dipisahkan sedangkan kumulatif (penjumlahan) adalah hasil pekerjaan tidak diperoleh secara berurutan, melainkan berdasar penjumlahan hasil keseluruhan.

Sedangkan strategi dipandang dari sudut pandang militer, meliputi pemilihan tempat untuk operasi militer, perencanaan, dan bagaimana cara untuk menggunakan kekuatan militer ditempat tersebut. (Bolan, Robert I , http://www.globalsecurity.org/military/library/ report/1992/BRI.htm, diakses 27 April 2009).

Dengan adanya pedoman strategi suatu negara, maka negara bisa dengan cepat mengantisipasi serta bisa berupaya maksimal untuk melindungi kepentingan naisonal dan pencapaian keamanan nasionalnya.

2.6.1 Strategi Nasional

Strategi nasional menjadi bagian paling penting dalam melindungi dan mencapai kepentingan nasional. Beberapa negara mengkhususkan diri pada bidang-bidang tertentu untuk dapat mencapai semua kepentingan nasionalnya. Robert J Art menjelaskan dalam bukunya *A Grand Strategy for America* bahwa hal paling penting dalam strategi nasional adalah untuk menentukan kepentingan nasional.

> *The most fundamental task in devising a grand strategy is to determine a state's national interest. Once they are identified, they drive a nation's foreign policy and military strategy: they determine the basic direction that it takes, the types and amounts of resources that it needs, and the manner in which the state must employ them to succeed.* (Art, 2003: 45)

Art berpendapat bahwa sekali kepentingan itu berhasil diidentifikasi, maka hal tersebut akan mengendalikan kebijakan luar negeri dan strategi militer: hal tersebut menetukan landasan tindakan yang akan diambil, jenis dan sumber daya yang dibutuhkan serta bagaimana dan negara mana yang akan digunakan untuk mencapai kepentingan tersebut.

Dalam strategi nasional dijelaskan langkah-langkah kongkrit yang dapat diterapkan untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Robert J Art dalam bukunya *A Grand Strategy for America* bahwa "*a grand strategy tells a nation's leaders what goals they should aim for and how best they can use their country's military power to attain these goals"*(2003 : 1). Artikel tersebut menjelaskan bahwa sebuah strategi memberikan petunjuk kepada para pemimpin hal-hal apa yang menjadi tujuan utama yang harus dicapai dan bagaimana menggunakan militer untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

H. Richard Yarger memaparkan teori Art Lykke dalam jurnalnya yang berjudul *Towards A Theory of Strategy: Art Lykke and the Army War College Strategy Model* ada delapan dasar pemikiran strategi:

1. Strategi bersifat proaktif dan antisipatif, didefinisikan bagaimana seorang pemimpin akan menggunakan *power* yang ada untuk berlatih dalam mengontrol kondisi dan keadaan geografis untuk mencapai tujuan yang menunjang kepentingan nasional. Dalam strategi juga diberikan petunjuk

untuk menggunakan kekerasan atau persuasive dalam mencapai kepentingan nasinoal tersebut. Strategi bukanlah manejemen krisis, krisis manajemen terjadi saat tidak ada strategi dan saat tidak ada strategi itulah maka strategi dinyatakan gagal.

2. Seorang ahli strategi harus tahu apa yang ingin dicapainya, ia harus mengerti apa yang coba diraih oleh negaranya. Hanya dengan menganalisa dan mengerti keinginan dalam konteks internal dan eksternal.
3. Strategi harus mengidentifikasi keseimbangan diantara tujuan yang dicari, metode untuk mencapai tujuan, dengan tersedianya sumber daya. Dalam memformulasikan sebuah strategi akhir, cara dan tujuan adalah bagian-bagian yang tidak bisa dipisahkan.
4. Strategi adalah tujuan politik, dan tujuan politik ini harus mendominasi semua strategi. Tujuan politik dinyatakan dalam kebijakan. Kebijakan merupakan sebuah ekspersi dari keinginan pemerintah untuk negaranya, dan kebijakan memastikan bahwa strategi telah sesuai dengan tujuan.
5. Strategi bersifat hirarkis. Strategi mengalir dari tingkat nasional hingga tingkat yang paling rendah. Biasanya strategi muncul sebagai konsekuensi utama dari statement politik dan sebuah strategi keamanan nasional ataupun sebuah *grand strategy*. Strategi keamanan nasional menyiapkan tujuan dan petunjuk untuk menggunakan instrumen-instrumen *power*. Ilustrasi strategi yang hirarkis bisa kita lihat digambar dibawah ini. Dalam gambar ini cukup jelas bagaimana jenjang dan tingkatan strategi, mulai

dari perumusan strategi hingga cara-cara untuk melakukan langkah atau strategi tersebut di lapang.

Gambar 2.1

Strategi dan Implementasinya



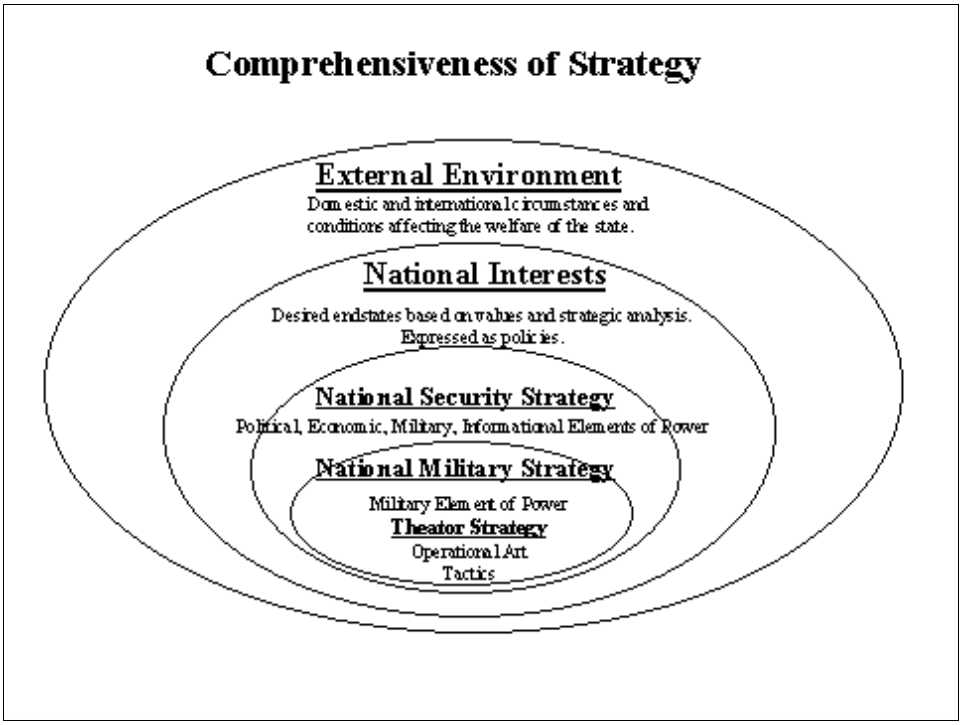
Sumber:
Towards A Theory of Strategy: Art Lykke and the Army War College Strategy Model diakses melalui http://dde.carlisle.army.mil/authors/stratpap.htm

6. Strategi haruslah komprehensif. Seorang ahli strategi harus bisa melihat sebuah strategi dari berbagai perspektif, dia harus mempertimbangkan seluruh aspek lingkungan strategis dalam analisanya untuk dapat menciptakan sebuah strategi yang mapan. Dia juga harus mempertimbangkan aspek internal dan eksternal. Disisi lain, dalam merancang sebuah strategi, seorang ahli strategi haruslah mengetahui setiap aspek (tujuan, aspek dan sumber daya) yang akan memberikan efek pada lingkungan disekitarnya. Untuk itu seorang ahli strategi harus

memiliki pengentahuan yang komprehensif terhadap apa yang sedang terjadi mana yang akan menjari prioritas utama, kedua dan seterusnya. Usaha seorang ahli strategi pun harus benar-benar sejalan dengan usaha dari senior, rekan dan pihak-pihak terkait. Yang paling penting adalah seorang ahli strategi harus bisa menangkap "gambar besar" dari kemampuan dan sumber daya institusinya dan dampak dari aksi terhadap lingkungan. Srategi tidak pernah berkembang dalam kondisi terisolasi.

Gambar 2.2

Komprehensivitas Strategi



Sumber: *Towards A Theory of Strategy: Art Lykke and the Army War College Strategy Model* diakses melalui http://dde.carlisle.army.mil/authors /stratpap.htm, diakses 7 Mei 2009)

7. Strategi dikembangkan melalui analisa dan pengetahuan akan situasi dan lingkungan strategis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menyoroti

faktor-faktor internal maupun eksternal yang membantu menentukan atau dapat mempngaruhi tujuan-tujuan tertentu, konsep dan sumber daya dari strategi.

8. Strategi bukanlah tanpa resiko gagal. Kegagalan dapat berupa kegagalan dalam upaya mencapai tujuan dan/atau gagal dalam memberikan keuntungan yang signifikan. (http://dde.carlisle.army.mil/authors stratpap.htm, diakses 7 Mei 2009).

Kedelapan pemikiran dasar strategi tersebut diatas akan menjadi sebuah pedoman bagi negara dalam merumuskan dan mengoperasionalkan strategi yang mewakili kepentingan-kepentingan nasional dan cara pencapaian kepentingan tersebut.

Dari Gambar 2.2 mengenai gambaran komprehensivitas strategi, kita dapat menyimpulkan bahwa strategi keamanan nasional dipengaruhi oleh lingkungan eksternal suatu negara, baik itu keadaan domestik maupun keadaan internasional serta kondisi-kondisi yang memberikan efek terhadap keamanan sebuah negara. Kemudian keadaan eksternal itu akan merujuk kepada kepentingan-kepentingan nasional, dimana hal ini akan mengeluarkan kebijakan sebagai *output*nya. Penentuan kepentingan nasional ini melalui pertimbangan dari nilai dan analisa para ahli strategi.

Berawal dari kepentingan nasional ini maka kemudian akan muncul strategi-strategi nasional, termasuk strategi politik, ekonomi, militer dan elemen-elemen power didalamnya. Strategi nasional ini menjadi garis pertama pertahanan

suatu negara dalam mempertahankan kedaulatan negara dan upaya pencapaian kebutuhan-kebutuhan nasional.

2.7 *Weapon of Mass Destruction* Dalam Dinamika Hubungan Internasional

Senjata dalam hubungan internasional dikenal sebagai sebuah alat untuk mempertahankan kedaulatan negara, meningkatkan *bargaining position* dan pengaruh untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasional suatu negara. Perkembangan teknologi senjata di era modern terjadi semenjak masa revolusi industri pada abad 18 dan akhirnya baru digunakan pada abad 20 saat Perang Dunia I dan Perang Dunia II terjadi. Jenis senjata akhirnya semakin bertambah banyak dan semakin berbahaya, hingga akhirnya lahirlah senjata yang dikenal sebagai senjata pemusnah massal.

Akibat dua peristiwa perang besar yang terjadi mendorong terjadinya perlombaan senjata diantara negara-negara besar di dunia. Lahirnya Perang Dingin setelah usainya Perang Dunia II yang melahirkan dua kutub besar yaitu AS dan Uni Soviet mendorong terjadinya perlombaan senjata yang lebih menegangkan dimana kedua pihak saling menghitung kekuatan masing-masing dalam segi militer membuat upaya untuk mengembangkan senjata dan upaya untuk menghambat penyebaran senjata-senjata pemusnah massal selalu diupayakan melalui perjanjian-perjanjian internasional.

AS adalah negara pertama yang menggunakan senjata atom untuk mengalahkan Jepang pada Perang Dunia II, beberapa kalangan menyimpulkan bahwa masa ini adalah era baru dalam senjata pemusnah massal. Mengingat

bahaya dan akibat yang ditimbulkan akibat senjata pemusnah massal maka beberapa upaya diplomasi digunakan dalam upaya untuk mencegah penyebaran dan kepemilikan atas senjata pemusnah massal melalui perjanjian-perjanjian internasional yang melibatkan hampir semua negara di dunia. (http://www.opendemocracy.net/theme_9-wmd/article_964.jsp, diakses 27 Juni 2009).

2.7.1 Konsep *Weapon of Mass Destruction*

Sejarah yang panjang mengenai senjata pemusnah massal telah dimulai sejak 430 sebelum masehi, dimana pada masa itu Democritus telah mengeluarkan teori atom dan ruang hampa. Senjata pemusnah massal yang pertama digunakan termasuk kategori senjata biologi yang dikenal dengan *plague* tanpa diketahui jenisnya, *plague* digunakan oleh pasukan Tartar di Eropa pada tahun 1346, kemudian berkembang ke bakteri yang dapat menyebabkan cacar yang digunakan pada tahun 1518 yang digunakan untuk menyerang penduduk Aztec. sedangkan senjata kimia pertama kali digunakan pada masa Perang Dunia I saat Jerman menggunakan mustard untuk melumpukan sebuah kota bernama Langermark pada tahun 1915 (http://www.opendemocracy.net/theme_9-wmd/article_964.jsp, diakses 27 Juni 2009).

Pada perkembangannya akhirnya muncul sebuah konsep tentang teori relativitas milik Einstein yang dikenalkan pada tahun 1905 yang menjadi dasar dalam pembuatan bom atom dan nuklir yang pertama digunakan oleh militer AS untuk mengalahkan Jepang pada Perang Dunia II dengan menjatuhkannya di kota

Hiroshima dan Nagasaki. Ketiga senjata ini kemudian dikenal dengan sebutan senjata pemusnah massal karena daya hancurnya yang luar biasa. (http://www.opendemocracy.net/theme_9-wmd/article_964.jsp, diakses 27 Juni 2009).

Grigory Borodavkin menyebutkan definisi tentang senjata pemusnah massal sebagai senjata yang bisa membunuh manusia, hewan dan tumbuhan ataupun menyebabkan kerusakan yang sangat hebat misalkan terhadap benda-benda buatan manusia seperti gedung ataupun merusak lingkungan. WMD meliputi beberapa tipe senjata termasuk nuklir, senjata biologi dan senjata kimia serta senjata yang menyebabkan radiasi. Ada beberapa kontroversi mengenai sejak kapan senjata pemusnah massal pertama kali digunakan, apakah pada tahun 1937 saat pengeboman lewat udara di Guanerica, Spanyol ataukah pada tahun 1945 saat AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. (Bodoravkin, *A Short Story of Weapon of Mass Destruction*)

Militer AS sendiri memiliki definisi mengenai senjata pemusnah massal.

> "Istilah WMD diperuntukkan bagi senjata dengan daya ledak dan hancur serta/atau digunakan untuk membunuh orang dalam jumlah besar. WMD bisa dalam bentuk bom dengan daya ledak besar, nuklir, senjata biologi, senjata kimia ataupun senjata radiologi, tetapi hal yang berhubungan dengan WMD seperti alat peluncur dan bagian-bagiannya bukan merupakan WMD." (http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode18/usc_sec_18_00002332---a000-.html)

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat yang dapat digunakan untuk mendukung perkembangan senjata pemusnah massal menimbulkan kekhawatiran akan keamanan di dunia internasional, karena jika senjata ini jatuh

ke tangan yang salah maka dapat dipastikan akan banyak orang yang menjadi korban atas penggunaan senjata pemusnah massal ini.

2.7.2 Senjata Kimia

Senjata kimia sendiri dalam konvensi yang diselenggarakan oleh *Organization for Prohibition of Chemical Weaons* (OPCW) atau organisasi pelarangan senjata kimia memberikan deskripsi tentang senjata kimia didalam artikel kedua yaitu definisi dan kriteria, senjata kimia didefinisikan sebagai:

> *"Chemical Weapons means the following, together or separately:*
> *(a) Toxic chemicals and their precursors, except where intended for purposes not prohibited under this Convention, as long as the types and quantities are consistent with such purposes;*
> *(b) Munitions and devices, specifically designed to cause death or other harm through the toxic properties of those toxic chemicals specified in subparagraph (a), which would be released as a result of the employment of such munitions and devices;*
> *(c) Any equipment specifically designed for use directly in connection with the employment of munitions and devices specified in subparagraph (b).”* (OPCW – *Convention on the prohibiton of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction*)

Dari definisi yang dijelaskan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang termasuk kedalam kriteria senjata kimia adalah: racun kimia dan bahan-bahan pendukungnya, kecuali bahan tersebut ada dengan tujuan yang jelas maka hal tersebut tidak berada dibawah perjanjian ini selama tipe dan kuantitasnya konsisten dengan tujuannya, kedua adalah alat pendukungnya terutama yang dirancang untuk menyebabkan kematian atau untuk menyakiti dengan

menggunakan bahan kimia berbahaya, serta semua peralatan yang dirancang khusus dalam hubungannya dengan kedua poin sebelumnya.

Setidaknya ada 70 jenis bahan kimia yang pernah digunakan sebagai senjata kimia selama abad ke 20, baik yang berbentuk cair, padat atau gas yang menimbulkan efek tercekik, mempengaruhi saraf atau darah serta menyebabkan kulit melepuh. Senjata kimia biasanya dikateogrikan berdasarkan akibat yang ditimbulkan dan dikelompokan menjadi *Nerve agents, mustard agenst, hydrogen cyanide*, gas air mata, arsenic, *psychotomimetic agents, toxins* dan senyawa lain yang potensial untuk dijadikan senjata kimia. Bahan kimia yang digunakan untuk melukai manusia dan dijadikan senjata dibagi kedalam dua kategori yaitu kategori mematikan dan kategori senjata yang mengantisipasi. Klasifikasinya berdasarkan jumlah bahan kimia yang digunakan, dikategorikan untuk mengantisipasi jika jumlahnya adalah 1/100 dari jumlah kategori mematikan, jumlahnya bukan merupakan jumlah yang absolut tetapi berdasarkan rata-rata statistik senjata kimia tersebut. Terdapat lima jenis senjata kimia, yaitu:

1. Senjata kimia yang merusak kulit, contohnya adalah: sulphur mustard, lewisite, nitrogen mustard, mustard-leweisite, phosgene-oxime.
2. Senjata kimia yang mempengaruhi saraf, contohnya: VX, Sarin, Soman, tabun, novichole agents.
3. Senjata kimia yang menyebabkan tercekik: chlorine, phosgene, diphosgene, chloropicrin.

4. Senjata kimia yang mempengaruhi darah, contohnya: herygem, sianida, cynaogen chlorine.
5. Senjata kimia untuk mengontrol massa, contohnya: gas air mata 2 (SN gas), gas air mata 0 (CS gas), psychedelic agent 3(BZ). (http://www.reachingcriticalwill.org/legal/cw/cwindex.html, diakses 1 Juli 2009)

Irak dikenal pernah menggunakan senjata kimia pada masa Perang Iran-Irak dan selalu melakukan upaya untuk mengembangkan dan memproduksi beberapa senjata kimia agar mereka tidak kehilangan pegnaruh di kawasannya. Beberapa senjata kimia yang dikembangkan Irak diantaranya adalah senjata kimia yang dapat mempengaruhi saraf seperti VX, Sarin dan tabun serta senjata kimia yang merusak kulit seperti mustard.

2.8 Konsep Pengaruh

Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Pengaruh dinyatakan secara tidak langsung oleh kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan yang menentukan *out-comes* (Paap, 1988 : 365).

Holsti dalam bukunya mendefinisikan bahwa pengaruh (*influence*) digunakan sebagai alat-alat persuasi untuk menjaga dan merubah perilaku aktor

lain dengan cara-cara yang sesuai dengan preferensi dan keinginan aktor A (1987: 88) Pengaruh dilihat dari aspek *power* pada dasarnya merupakan perangkat untuk mencapai tujuan. Beberapa pemerintahan atau negarawan akan mencari pengaruh untuk kepentingan negaranya, tetapi hanya merupakan alat. Mereka mempergunakannya terutama untuk mencapai atau mempertahankan tujuan lain termasuk prestise, keutuhan wilayah, semangat nasional, bahan mentah, keamanan atau persekutuan. (Holsti, 1990, 201).

Pengaruh yang dimaksud pada penelitian kali ini adalah hasil timbul dari kondisi atau situasi tertentu sebagai sumber dimana antara sumber dan hasil memiliki relevansi yang kuat, konseptualisasi pengaruh tersebut menyangkut:

1. Hal yang dipengaruhi.
2. Perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar ataupun dalam negeri dari negara yang dipengaruhi.
3. Asumsi, kriteria, dan data yang penting dalam menganalisis hal yang dipengaruhi dan perubahan dalam kebijakan luar ataupun dalam negeri (Rubenstein, 1976 : 3).

Penggunaan pengaruh secara tidak langsung lebih daripada hanya untuk mengubah perilaku negara lain. Pengaruh dapat dilihat ketika suatu negara berusaha mempengaruhi negara lain untuk melanjutkan tindakan atau kebijaksanaan yang sesuai dengan kepentingan negara tersebut (Holsti, 1987 : 203). Sedangkan, variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan pengaruh antara lain adalah:

1. Kapabilitas negara.

2. Persepsi terhadap pemakaian kapabilitas tersebut.
3. Kebutuhan yang luas antara dua negara dalam hubungan yang saling mempengaruhi.
4. Kualitas ketanggapan.
5. Pengorbanan dan komitmen. (Holsti, 1987 : 209-215).

Menurut James N Rosenau dalam Perwita, dalam interaksi antar negara terdapat hubungan pengaruh dan respons, dimana:

> "pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tersebut. Bagaimanapun juga negara yang menjadi sasaran pengaruh yang langsung maupun tidak langsung, harus menentukan sikap melalui respons, manifestasi dalam hubungan dengan negara lain untuk memperngaruhi atau memaksa pemerintah negara lain agar menerima keinginan politiknya." (2005 : 41).

Dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan dan pengaruh juga merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan akhir. Berbagai cara dapat dilakukan untuk memperluas pengaruh sehingga dapat mencapai tujuan akhir yang dicita-citakan. Menurut Rubenstein ada beberapa asumsi dasar dari pengaruh, yaitu:

1. Secara operasional konsep pengaruh digunakan secara terbatas dan sespesifik mungkin dalam konteks transaksi diplomatik.
2. Sebagai konsep multidimensi, konsep pengaruh diukur oleh beberapa kebenaran (proposisi). Sejumlah konsep pengaruh dapat diidenfitikasikan sangat terbatas, dikarenakan tingkah laku B yang dapat mempengaruhi A sangat terbatas pula.

3. Jika pengaruh A terhadap B besar, maka akan mengancam sistem politik domestik B, termasuk sikap, perilaku domestik dan institusi B.
4. Pengetahuan yang dalam mengenai politik domestik B sangat penting untuk mempelajari hubungan kebijakan luar negeri antara A dan B dikarenakan pengaruh tersebut akan dimanifestasikan secara konkret dalam konteks isu tertentu di negara B.
5. Pada saat seluruh pengaruh dari suatu negara dikompromikan dengan kedaulatan negara lain secara menyeluruh dan tidak jarang dapa memperkuat atau memperlemah kekuatan pemerintah dari negara yang dipengaruhi, terdapat batasan dimana pengaruh tersebut tidak berpengaruh terhadap suatu negara atau pemimpin negara tersebut. Pemerintah B tidak akan memberi konsesi-konsesi terhadap A yang dapat melemahkan kekuatan politik domestic kecuali bila A menggunakan kekuatan-kekuatan militer terhadap B.
6. Negara donor berpengaruh terhadap negara lain melalui bantuan-bantuan yang diberikannya, tidak hanya karena adanya timbal balik dari B kepada A, akan tetapi juga reaksi dari negara-negara lainnya yang dapat berpengaruh terhadap hubungan A dan B.
7. Data-data yang relevan untuk mengevaluasi pengaruh terdiri dari lima kategori.
    - Ukuran perubahan konsepsi dan tingkah laku.
    - Ukuran interaksi yang dilakukan secara langsung (kuantitas dan kumpulan data)

- Ukuran pengaruh yang ditujukan.
- Studi kasus, dan
- Faktor perilaku *ideosyncretic*.

8. Sistem yang biasa digunakan untuk menentukan pengaruh adalah dengan menggunakan variabel yang ada diantara negara-negara.

Konsep pengaruh dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, kita bisa melihat bagaimana ekonomi mempengaruhi kehidupan politik dan sebaliknya, dimana kegiatan politik akan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Sehingga, dapat kita simpulkan bahwa hubungan internasional merupakan sebuah dinamika dan hubungan timbal balik.